

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Investasi

2.1.1.1 Pengertian Investasi

Investasi atau penanaman modal dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan modal perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan juga perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang-barang dan juga jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 2013).

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing dan modal asing. Pengertian-pengertian ini terdapat dalam Bab 1 Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Sedangkan, yang dimaksud dengan penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memberi pengertian penanaman modal asing sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Dalam Undang-

undang hanya mengatur penanaman modal asing yang dilakukan secara langsung. Sedangkan mengenai bidang-bidang usaha tidak terdapat dalam Undang-undang ini, terdapat dalam peraturan pelaksanaan yang berupa Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang kriteria dan persyaratan penyusunan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal dan Peraturan Presiden RI Nomor 77 tahun 2007 tentang Daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal serta Peraturan Presiden RI Nomor 111 tahun 2007 tentang perubahan terhadap Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007.

Investasi dan depresiasi merupakan dua kekuatan yang mempengaruhi persediaan modal. Investasi mengacu pada pengeluaran untuk perluasan usaha dan peralatan baru, hal itu menyebabkan persediaan modal bertambah. Sedangkan, depresiasi mengacu pada penggunaan modal dan hal itu menyebabkan persediaan modal berkurang (Mankiw, 2007).

Pengeluaran yang digolongkan sebagai investasi (pembentukan modal atau penanaman modal) yang pertama adalah pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan. Yang kedua adalah pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik dan bangunan-bangunan lainnya. Yang ketiga adalah penambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun penghitungan pendapatan nasional (Sukirno, 2013).

2.1.1.2 Teori Investasi

1. Teori Klasik

Teori ekonomi klasik menyatakan bahwa keinginan individu atau masyarakat untuk menabung adalah sama dengan keinginan perusahaan untuk melakukan investasi. Pandangan ini dapat ditulis sebagai berikut:

$$I = S$$

Dalam Teori Investasi Klasik diasumsikan bahwa:

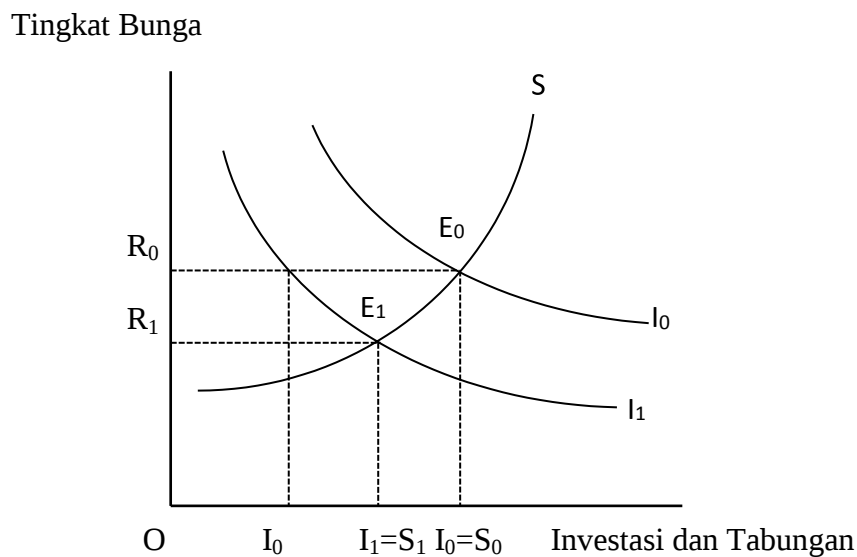
a. Tabungan adalah fungsi dari tingkat bunga

Yaitu semakin tinggi tingkat bunga, semakin tinggi pula keinginan masyarakat untuk menabung. Artinya bahwa pada tingkat bunga yang lebih tinggi, masyarakat akan terdorong untuk mengurangi pengeluaran untuk konsumsi dengan maksud untuk menambah tabungan.

b. Investasi juga merupakan fungsi dari tingkat bunga

Yaitu semakin tinggi tingkat bunga, keinginan untuk melakukan investasi akan semakin rendah. Dimana investasi akan dilakukan apabila pendapatan dari investasi (*return on investment*) lebih besar dari tingkat bunga yang berlaku atau tingkat bunga riil sebab tingkat bunga merupakan biaya atau ongkos penggunaan dana (*cost of capital*)

Pendapat Klasik mengenai hubungan anatara tabungan, investasi dan tingkat bunga digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Hubungan Investasi, Tabungan dan Tingkat Bunga Versi Klasik

Dari gambar diatas dapat diterangkan bahwa kurva tabungan (S) menunjukkan tingkat tabungan pada kesempatan kerja penuh atau full employment pada berbagai tingkat bunga, sedangkan keinginan berinvestasi perusahaan ditunjukkan oleh kurva I_0 . Sehingga bila pada mulanya keseimbangan diantara tabungan dan investasi ($I_0 = S_0$) dicapai pada titik E_0 , dimana keseimbangan tingkat bunga ada pada titik R_0 .

Apabila misalnya permintaan investasi berubah dari I_0 menjadi I_1 maka pada tingkat bunga R_0 sebanyak S_0 tabungan ditawarkan dalam pasar, sedangkan investasi yang terjadi akan merosot menjadi I'_0 . Kelebihan tabungan inilah yang akan menurunkan tingkat bunga menjadi R_1 sehingga terjadi keseimbangan baru pada titik E_1 , dimana tabungan yang baru telah sama kembali dengan permintaan investasi ($I_1 = S_1$). Hal ini terjadi karena pada saat terjadi kelebihan tabungan maka para penabung akan saling bersaing untuk meminjamkan dananya sehingga akan menekan tingkat

bunga. Demikian juga bila terjadi kondisi sebaliknya.

Dari teori investasi klasik ini disimpulkan bahwa terdapat fleksibilitas tingkat bunga yang akan menjamin terwujudnya keadaan tabungan selalu sama dengan investasi ($I = S$) sehingga keseimbangan antara tabungan dan investasi selalu tercapai. Dengan kata lain, tingkat bunga merupakan hasil interaksi antara tabungan (S) dan investasi (I).

2. Teori Neo-Klasik

Pandangan aliran Neo-Klasik didasarkan pada pemikiran–pemikiran ekonomi klasik mengenai penentuan keseimbangan faktor–faktor produksi oleh perusahaan dalam memaksimumkan keuntungannya dengan menciptakan penyesuaian yang cepat apabila terjadi ketidakseimbangan dalam perekonomian sebab pelaku ekonomi mempunyai sikap ‘ekspektasi’ yang bersifat ‘rasional’ dalam menghadapi persoalan–persoalan ekonomi di masa yang akan datang. Menurut Neo-Klasik, dalam memutuskan berapa besar modal yang akan digunakan dalam melakukan kegiatan produksi, perusahaan akan membandingkan nilai produk marginal modal dengan biaya pemakaian modal atau biaya sewa modal. Asumsi ini dalam bentuk persamaan adalah sebagai berikut:

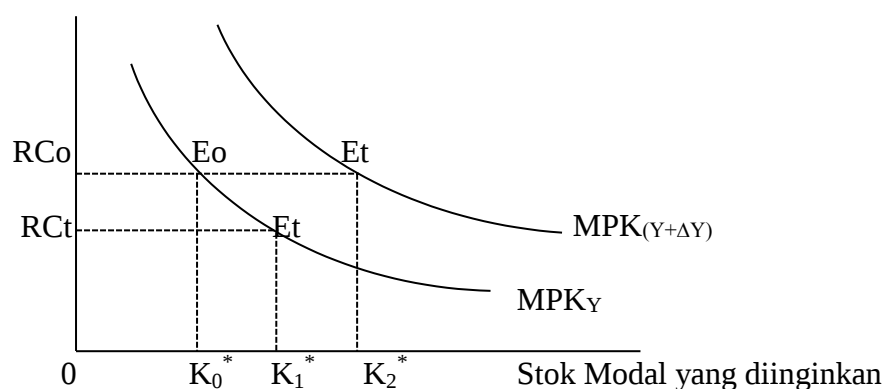
$$MPK = RC$$

Nilai produk marginal modal (MPK) adalah penambahan nilai output yang diperoleh dengan adanya tambahan satu unit modal. Sedangkan biaya sewa modal (*cost of capital atau rental cost* = RC) merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh modal, baik modal yang dihasilkan oleh perusahaan itu sendiri berupa keuntungan yang ditahan

untuk tidak dipinjamkan kepada pihak lain atau biasa disebut *opportunity cost*, maupun biaya modal yang dikeluarkan atas modal yang diperoleh dengan meminjam dari pihak lain atau biasanya berupa tingkat bunga atau *interest rate*.

Dengan demikian, teori investasi Neo-Klasik melakukan suatu analisis terhadap besarnya modal yang akan digunakan oleh perusahaan apabila diketahui besarnya biaya dan hasil yang diperoleh atas penggunaan modal serta tingkat output yang diharapkan untuk diproduksi. Artinya dapat ditentukan 'stok modal yang diinginkan' atau '*desired capital stock*'. Hubungan antara stok modal yang diinginkan (K^*), biaya sewa modal (RC), dan tingkat output dapat dinyatakan melalui gambar berikut:

Biaya Sewa Modal



Gambar 2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Biaya Memperoleh Modal dan Melakukan Investasi

Kurva MPK_Y menunjukkan nilai produksi marginal modal pada suatu tingkat output tertentu atau Y sedangkan kurva RC menunjukkan biaya memperoleh modal, dimana menurut Neo-Klasik, biaya memperoleh modal ini dipengaruhi oleh tingkat bunga, tingkat depresiasi, dan kebijakan

pemerintah seperti kebijakan pajak.

Titik E_0 menunjukkan keseimbangan diantara RC_0 dengan $MPKY$ sehingga pada tingkat output Y , stok modal yang diinginkan adalah K_0^* . Artinya stok modal yang seperti ini akan memberikan keuntungan yang paling maksimum kepada perusahaan. Bila, misalnya, terjadi peningkatan output maka peningkatan output ini akan menggeser $MPKY$ menjadi $MPK_{(Y+\Delta Y)}$. Hal ini akan menciptakan keseimbangan baru pada E_2 , yang berarti tingkat stok modal yang diinginkan pada tingkat output yang baru ini meningkat lebih tinggi dari K_0^* , yaitu menjadi K_2^* . Apabila terjadi penurunan biaya sewa modal dari RC_0 menjadi RC_1 , yang berarti dengan jumlah output yang tetap, akan tercipta keseimbangan baru menjadi E_1 , dimana stok modal yang diinginkan akan meningkat menjadi K_1^* .

Menurut Neo-Klasik, kondisi keseimbangan seperti diatas tidak terjadi dengan seketika sebab stok modal yang diinginkan (K^*) oleh perusahaan seringkali akan berbeda dengan stok modal yang sebenarnya atau stok modal yang aktual (K^a) sehingga perusahaan akan melakukan ‘penyesuaian stok modal’ atau ‘*stock capital adjustment*’ dengan mengubah stok modal perusahaan untuk bergerak ke stok modal yang diinginkan.

Namun hal ini tidak dapat dilakukan dengan segera karena adanya ‘beda waktu’ atau ‘*time lag*’, dimana perusahaan memerlukan waktu untuk merencanakan dan menyelesaikan proyek-proyek investasi. Artinya tidaklah mungkin perusahaan akan mencoba untuk menyesuaikan stok modal aktual (K^a) terhadap stok modal jangka panjang yang diinginkan

perusahaan dalam waktu seketika. Perusahaan biasanya akan merencanakan penyesuaian stok modal selama bertahap selama satu periode.

Untuk itu teori investasi Neo-Klasik merumuskan bahwa *investasi netto* atau *net investment* yang dilakukan setiap periode dituliskan dalam persamaan berikut:

$$I = \alpha (K^* - K^a)$$

dimana α merupakan suatu kecepatan penyesuaian, yang menunjukkan perbandingan antara investasi yang sebenarnya akan dilakukan dengan perbedaan diantara stok modal yang diinginkan dengan stok modal yang tersedia.

Teori investasi Neo-Klasik menjadi penting dalam menganalisis perilaku investasi (*investment behavior*) perusahaan sebab teori investasi Neo-Klasik telah menggunakan ‘analisis ekonomi dinamis’ untuk menerangkan perilaku investasi perusahaan. Ekonomi Neo-Klasik mengatakan bahwa faktor–faktor yang mempengaruhi perilaku investasi ini adalah tingkat suku bunga riil (RI), tingkat depresiasi (d), tingkat output nasional atau tingkat pendapatan nasional (Y), stok modal yang sebenarnya tersedia (K^a), dan kebijakan pemerintah (G).

3. Teori Harrod-Domar

Teori Harrod-Domar memandang bahwa pembentukan modal dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa, maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Dimana apabila pada suatu masa tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal, maka pada masa

berikutnya perekonomian tersebut mempunyai kemampuan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa yang lebih besar (Sukirno, 2007: 256-257).

2.1.2 Penanaman Modal Asing

2.1.2.1 Pengertian Penanaman Modal Asing

Secara umum, PMA adalah bentuk investasi yang ditanamkan langsung dan bergerak di berbagai bidang. Di dalam arus PMA langsung tidak termasuk investasi portofolio global berbentuk saham lewat jual beli di bursa, obligasi dan surat berharga lainnya. Dibandingkan dengan hutang, PMA sering dianggap sebagai cara yang lebih menguntungkan dan lebih aman dalam membiayai pembangunan, selain karena faktor resiko kegagalan usaha dipegang oleh investor asing dimana pada hutang, negara (dalam kondisi apapun) berkewajiban untuk membayar utang beserta bunganya, juga karena PMA terkait dengan kepemilikan langsung, penguasaan pabrik, peralatan dan infrastruktur yang turut membiayai kapasitas penciptaan pertumbuhan dalam suatu perekonomian, sedangkan pinjaman luar negeri jangka pendek lebih sering digunakan untuk membiayai konsumsi (Latip : 2009).

Jaminan kepastian hukum diberikan pemerintah Indonesia terhadap investor terutama investor asing dengan menerbitkan Undang-Undang pada tahun 1967, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang ditujukan untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia serta digunakan dalam bidang-bidang dan sektor-sektor yang dalam waktu dekat belum dan atau tidak dapat dilaksanakan oleh modal Indonesia sendiri yang disebabkan oleh ketiadaan modal, pengalaman dan teknologi. Dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung, menanggung resiko dari

penanaman modal tersebut. Sedangkan pengertian modal asing dalam Undang-undang tersebut adalah:

1. Alat pembayaran luar negeri yang bukan merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang mendapat persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
2. Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru dari orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.
3. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang-undang ini keuntungan yang diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

2.1.2.2 Teori Penanaman Modal Asing

Penanaman modal diperlukan untuk mempercepat pembangunan ekonomi dalam mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Disamping menggali sumber pembiayaan asli daerah, pemerintah juga mengundang sumber pembiayaan luar negeri salah satunya adalah penanaman modal asing (Sarwedi, 2002). Penanaman modal asing lebih banyak mempunyai kelebihan diantaranya sifatnya permanen (jangka panjang), banyak memberikan andil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen serta membuka lapangan kerja baru (Sagita, 2013).

Teori-teori yang berkaitan dengan kepentingan negara dalam bidang investasi, tinjauannya adalah dari sudut pandang kepentingan pembangunan

ekonomi, yaitu melihat segi kepentingan ekonomi yang menjadi dasar pertimbangan perumusan kebijakan. Oleh karena itu lazim untuk meminjam teori-teori ekonomi pembangunan sebagai dasar pijakan hukum investasi yang cukup populer, antara lain (Ardiansyah, 2014):

1. Teori Ekonomi Neoklasik (*Neo-Classical Economic Theory*).

Teori ini berpendapat bahwa penanaman modal asing memiliki kontribusi yang positif terhadap pembangunan ekonomi *host country* atau dimana negara mendirikan atau menanamkan investasinya. Modal asing yang dibawa ke *host country* akan digunakan untuk berbagai usaha sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Teori ini memandang bahwa investasi asing secara keseluruhan bermanfaat atau menguntungkan *host country*.

2. Teori Ketergantungan (*Dependency Theory*).

Teori ini secara diametral berlawanan dengan teori ekonomi neoklasik dengan berpendapat bahwa penanaman modal asing tidak menimbulkan makna apa pun bagi pembangunan ekonomi di *host country*. Mereka berpendapat bahwa penanaman modal asing menindas pertumbuhan ekonomi dan menimbulkan ketidakseimbangan pendapatan. Teori ini berpendapat bahwa penanaman modal asing sebagai ancaman terhadap kedaulatan *host country* dan terhadap kebebasan pembangunan kehidupan sosial dan budaya karena investasi asing cenderung memperluas yurisdiksi menggunakan pengaruh kekuatan pemerintah asing terhadap *host country* sehingga pengaruh politik investasi asing terhadap *host country* cukup besar.

3. Teori Jalan Tengah (*The Middle Path Theory*).

Banyak negara berkembang mengembangkan regulasi antara lain mengatur perizinan dan pemberian insentif melalui kebijakan investasi. Menurut teori ini investasi asing memiliki aspek positif dan aspek negatif terhadap *host country*, karena itu *host country* harus hati-hati dan bijaksana. Kehati-hatian dan kebijaksanaan dapat dilakukan dengan mengembangkan kebijakan regulasi yang adil.

4. Teori Intervensi Pemerintah (*Government Intervention Theory*).

Pendukung teori ini berpendapat, perlindungan terhadap *infant industry* atau industri yang masih dalam tahap awal dari siklus hidup industri di negara-negara berkembang dan kompetensi dengan industri di negara-negara maju merupakan hal yang esensial bagi pembangunan nasional. Teori ini melihat pentingnya peran negara yang otonom yang mengarahkan langkah kebijakan ekonomi termasuk investasi, peran negara dipercaya akan bisa mengintervensi pasar untuk mengoreksi ketimpangan pasar dan memberikan perlindungan kepada *infant industry*, kepentingan masyarakat, pengusaha domestik dan perlindungan lingkungan. Peran negara juga dapat memberi perlindungan bagi kepentingan para investor termasuk investor asing.

Berdasarkan teori-teori yang dipaparkan, terlihat bahwasanya *host country* membutuhkan keberadaan investasi asing bagi pembangunan ekonomi negaranya, akan tetapi seperti halnya *host country* yang memiliki kepentingan, investor asing tentunya juga memiliki kepentingan. Sebagai pelaku ekonomi jelas kepentingan investor asing adalah mencari keuntungan maksimal. Sehingga diperlukan kerjasama yang baik agar kepentingan masing-masing tidak merugikan kedua belah pihak.

2.1.2.3 Tujuan dan Fungsi Penanaman Modal Asing

Penanaman Modal Asing langsung mempunyai beberapa tujuan dan fungsi, yaitu:

1. Tujuan Penanaman Modal Asing (PMA)
 - a. Untuk menarik arus modal yang besar ke suatu negara.
 - b. Untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya produksi yang rendah dan pemanfaatan pajak lokal.
 - c. Untuk menciptakan hambatan atau membuat tantangan dalam sebuah perdagangan bagi perusahaan lainnya.
 - d. Untuk mendapatkan *return* yang tinggi dari Negara sendiri dan sistem perpajakan yang lebih menguntungkan serta infrastruktur yang lebih baik dan memadai.
2. Fungsi Penanaman Modal Asing
 - a. Penanaman Modal Asing mampu meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat di suatu negara tersebut.
 - b. Penanaman Modal Asing dapat membantu dalam pembangunan ekonomi misalnya dalam proses industrialisasi yang sedang berlangsung.
 - c. Penanaman Modal Asing bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi di negara tersebut.
 - d. Penanaman Modal Asing dapat menambah cadangan devisa negara.
 - e. Penanaman Modal Asing dapat membantu penyerapan tenaga kerja lebih banyak sehingga dapat mengurangi pengangguran.

2.1.2.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penanaman Modal Asing

Menurut Sanyoto Sastrowardoyo, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi investasi secara umum adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Bidang Penanaman Modal (Investasi)

Sistem intensif penanaman modal yang mencakup faktor promosi yang meliputi fasilitas perpajakan, metode depresiasi barang modal, fasilitas dan prosedur impor, barang-barang modal dan bahan baku atau penunjang produksi, proteksi perdagangan, kemudahan penggunaan tenaga kerja, program pelatihan tenaga kerja, peraturan penanaman modal (investasi) yang meliputi batas maksimum kepemilikan saham perusahaan asing, bidang-bidang usaha terbuka bagi orang asing, ketentuan lokal pabrik, ketentuan produksi yang harus diekspor, ketentuan proses produksi, kebijakan tentang teknologi dan kebijakan tentang ketenagakerjaan.

2. Kebijakan Bidang Infrastruktur

Kebijakan yang membentuk kondisi dalam negeri yang meliputi stabilitas politik, sosial, dan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, peraturan devisa, kualitas tenaga kerja tingkat upah atau gaji karyawan dan sistem hubungan kerja, tersedianya sumber daya alam dan biaya perolehannya, pembangunan prasarana fisik (pelabuhan laut, jalan, sistem telekomunikasi dan tenaga listrik), kualitas hidup masyarakat, tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Variabel-variabel makro ekonomi yang meliputi ukuran dalam negeri dan pasar (tingkat Produk Domestik Bruto dan tingkat Produk Nasional Bruto), tingkat resiko politik, suku bunga, dan nilai tukar mata uang (valuta asing terhadap rupiah).

2.1.3 Inflasi

2.1.3.1 Pengertian Inflasi

Menurut Sukirno (2010) Secara umum inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang atau komoditas dan jasa selama jangka waktu tertentu. Inflasi dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit perhitungan moneter terhadap suatu komoditas. Definisi inflasi oleh para ekonom modern adalah kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan (nilai unit perhitungan moneter) terhadap barang-barang/komoditas dan jasa. Sebaliknya, jika yang terjadi adalah penurunan nilai unit perhitungan moneter terhadap barang-barang/komoditas dan jasa didefinisikan sebagai deflasi.

Inflasi adalah salah satu masalah yang terus menerus menjadi perhatian pemerintah. Tujuan jangka panjang pemerintah adalah menjaga agar tingkat inflasi yang berlaku pada tingkat yang sangat rendah. Tingkat inflasi nol persen bukanlah tujuan utama pemerintah karena ia adalah sukar untuk dicapai. Yang paling penting untuk diusahakan adalah menjaga agar tingkat inflasi tetap rendah. Namun, adakalanya tingkat inflasi meningkat dengan tiba-tiba atau wujud sebagai akibat suatu peristiwa tertentu yang berlaku diluar ekspektasi pemerintah, misalnya efek dari pengurangan nilai uang (depresiasi nilai uang) yang sangat besar atau ketidakstabilan politik. Menghadapi masalah inflasi yang bertambah cepat ini pemerintah akan menyusun langkah-langkah yang bertujuan agar kestabilan harga dapat diwujudkan kembali.

2.1.3.2 Penggolongan Inflasi

Menurut Yuliadi (2008) inflasi dalam teori ekonomi dibedakan menjadi beberapa macam dalam pengelompokkan tertentu yaitu:

1. Inflasi rendah adalah inflasi dengan laju dibawah dari 10% per tahun, inflasi ini juga disebut dengan inflasi di bawah dua digit. Inflasi ini tidak memiliki pengaruh yang merusak pada perekonomian.
2. Inflasi sedang adalah inflasi yang berada antara 10% sampai 30% per tahun. Inflasi ini cukup dirasakan oleh masyarakat yang berpenghasilan tetap.
3. Inflasi tinggi adalah inflasi yang berada antara 30% sampai 100% per tahun. Terjadiya inflasi tinggi ini karena tidak stabilnya kondisi politik dan menghadapi krisis yang berkepanjangan. Pada inflasi ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga ekonomi seperti perbankan.
4. *Hyperinflation* adalah inflasi yang berada di atas 100% per tahun dan dapat mengakibatkan krisis perekonomian yang panjang. Situasi ini ditandai dengan adanya pergantian pemerintahan dan pergolakan politik. Perekonomian melemah dikarenakan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap mata uang yang beredar.

Menurut Yuliadi (2008) penggolongan inflasi berdasarkan sifatnya ada tiga macam, yaitu:

1. Inflasi merayap (*creeping inflation*), adalah inflasi dengan laju yang relatif rendah yaitu di bawah 10% per tahun. Pergerakan inflasi berjalan secara lambat dan dalam waktu yang tidak singkat. Menurut sifatnya tersebut, inflasi merayap tidak menimbulkan pengaruh yang besar terhadap perekonomian.
2. Inflasi menengah (*galloping inflation*), adalah inflasi yang ditandai dengan kenaikan yang relatif cukup besar biasanya berada di atas 10%. Sifat inflasi

ini berjalan dengan tempo yang singkat serta berdampak akseleratif dan akumulatif artinya inflasi bergerak dengan laju yang semakin besar.

3. Inflasi tinggi (*hyper inflation*), adalah inflasi dengan tingkat yang sangat tinggi dan dapat mengakibatkan efek yang merusak perekonomian karena menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap nilai uang. Dalam jangka pendek harga barang naik berkali-kali lipat.

Menurut Supriyanto (2007), Inflasi digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Berdasarkan Tingkatannya

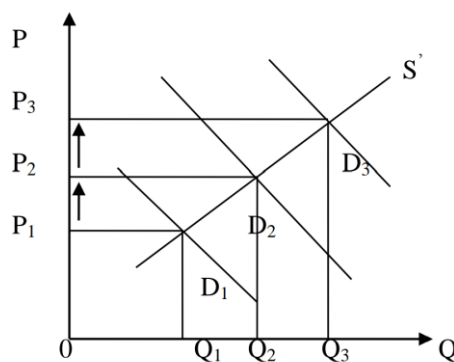
- a. Inflasi ringan yaitu dibawah 10% setahun.
- b. Inflasi sedang yaitu antara 10%-30% setahun.
- c. Inflasi berat yaitu antara 30%-100% setahun.
- d. Hiperinflasi atau inflasi tidak terkendali yaitu diatas 100% setahun.

2. Berdasarkan Sebab-sebabnya

- a. *Demand Inflation*

Demand inflation yaitu inflasi yang timbul karena tingginya permintaan masyarakat terhadap berbagai barang dan jasa. Peningkatan permintaan masyarakat terhadap barang atau jasa (*aggregate demand*), disebabkan oleh beberapa hal seperti bertambahnya pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pencetakan uang, kenaikan permintaan ekspor, dan bertambahnya pengeluaran investasi swasta karena kredit yang murah. Inflasi jenis ini biasanya dikenal juga sebagai *philips curve inflation*. Dalam konteks makro ekonomi, kondisi ini digambarkan oleh *output riil*

yang melebihi *output* potensinya atau permintaan total (*aggregate demand*) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian.



Sumber: Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*. Edisi Ketiga (2010)

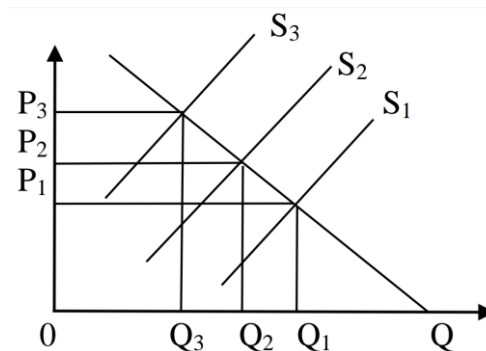
Gambar 2.3 Demand full inflation

Pergeseran kurva permintaan barang dan jasa dari D_1 - D_2 disebabkan karena adanya penambahan permintaan sebesar Q_1 - Q_2 yang berakibat naiknya harga P_1 - P_2 . jika permintaan terus bertambah ke Q_2 - Q_3 menyebabkan harga akan terus naik menjadi P_2 - P_3 , begitu seterusnya. Hal ini akan menyebabkan kenaikan harga terus-menerus dan menyebabkan terjadinya inflasi. Inflasi jenis inilah yang disebut sebagai *demand pull inflation*, dan inflasi jenis ini lebih mudah diatasi.

b. Cost Inflation

Cost inflation yaitu inflasi yang timbul karena kenaikan biaya produksi. *Cost inflation* terjadi jika biaya produksi naik, misalnya disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Faktor-faktor yang menyebabkan *cost push inflation* adalah seperti depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara *partner* dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (*administered*

price) dan terjadi *negative supply shock* akibat bencana alam dan terganggunya distribusi.



Sumber: Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*. Edisi Ketiga

Gambar 2.4 Cost Inflation

Pergeseran kurva penawaran sebesar S_1 - S_2 karena adanya kenaikan biaya faktor produksi menggeser permintaan barang sebesar Q_1 - Q_2 yang berakibat naiknya harga barang P_1 - P_2 . Jika biaya produksi terus naik menjadi Q_2 - Q_3 , menyebabkan harga akan terus naik ke P_2 - P_3 , begitu seterusnya. Hal ini akan menyebabkan kenaikan harga yang terus menerus menjadi sulit untuk diturunkan, sehingga jenis inflasi ini relatif tidak mudah untuk diatasi.

c. Berdasarkan Tempat Asalnya

1. Inflasi berasal dari dalam Negeri (*Domestic Inflation*) Inflasi yang berasal dari dalam negeri timbul karena terjadinya defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat harga bahan makanan menjadi mahal.

2. Inflasi berasal dari Luar Negeri (*Imported Inflation*)

Inflasi dari luar negeri adalah inflasi yang timbul sebagai akibat dari kenaikan harga barang impor. Hal ini terjadi karena tingginya biaya

produksi barang di luar negeri atau adanya kenaikan tarif impor barang.

2.1.3.3 Teori Inflasi

Menurut Karim (2008: 35) paling tidak ada empat teori inflasi yang menjadi patokan penyebab dan pemberian solusi ketika terjadi inflasi. Keempat Teori tersebut yaitu Teori Kuantitas, Teori Keynes, Teori Strukturalis, dan Teori Mark Up Model.

1. Teori Kuantitas

Inti dari teori kuantitas adalah pertama, bahwa inflasi itu hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang beredar, baik uang kartal maupun giral. Inti yang kedua adalah laju inflasi ditentukan oleh laju pertumbuhan jumlah uang yang beredar dan psikologi atau harapan masyarakat mengenai kenaikan harga dimasa yang akan datang.

2. Teori Keynes

Menurut teori ini inflasi terjadi karena masyarakat memiliki permintaan melebihi jumlah uang yang tersedia. Dalam teorinya, Keynes menyatakan bahwa inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup melebihi batas kemampuan ekonomisnya. Proses perebutan atas golongan masyarakat masih menimbulkan permintaan agregat (keseluruhan) yang lebih besar dari pada jumlah barang yang tersedia, mengakibatkan harga secara umum naik. Jika hal ini terus terjadi maka selama itu pula proses inflasi akan berlangsung. Yang dimaksud dengan golongan masyarakat yaitu:

- a. Pemerintah, yang melakukan percetakan uang baru untuk menutup defisit anggaran belanja negara.

- b. Pengusaha swasta, yang menambah investasi baru dengan kredit yang mereka peroleh dari bank.
- c. Pekerja atau serikat buruh, yang menuntut kenaikan upah melebihi pertambahan produktivitas.

Tidak semua golongan masyarakat berhasil memperoleh tambahan dana, karena penghasilan mereka rata-rata tetap dan tidak bisa mengikuti laju inflasi, misalnya pegawai negeri, pensiunan, dan petani.

1. Mark-up Model

Dalam teori ini dasar pemikirannya ditentukan oleh dua komponen yaitu *cost of production* dan *profit margin*. Jadi apabila ada kenaikan antara dua komponen maka harga jual komoditi di pasar juga akan meningkat.

2. Teori Struktural

Teori ini juga bisa disebut dengan teori inflasi jangka panjang. Karena menyoroti sebab-sebab inflasi yang berasal dari kekuatan struktur ekonomi. Khususnya penawaran tahunan dan barang-barang ekspor.

2.1.4 Suku Bunga

2.1.4.1 Pengertian Suku Bunga

Tingkat suku bunga adalah harga dari penggunaan dana investasi (*loanable funds*). Tingkat suku bunga merupakan salah satu indikator dalam menentukan apakah seseorang akan melakukan investasi atau menabung (Boediono, 1994).

Menurut Karl dan Fair (2001), suku bunga adalah pembayaran bunga tahunan dari suatu pinjaman, dalam bentuk persentase dari pinjaman yang diperoleh dari jumlah bunga yang diterima tiap tahun dibagi dengan jumlah

pinjaman. Pengertian tingkat suku bunga menurut Sunariyah (2004) adalah harga dari pinjaman. Tingkat suku bunga dinyatakan sebagai persentase uang pokok per unit waktu. Bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur.

Siamat (2005) membedakan pengertian bunga (*interest*) dalam dua perspektif, yaitu:

1. Bunga dari Sisi Permintaan

Bunga dari sisi permintaan dan sisi penawaran merupakan pendapatan atas pemberian kredit. Bunga merupakan sewa atau harga dari uang.

2. Bunga dari Sisi Penawaran

Pemilik dana akan menggunakan atau mengalokasikan dananya pada jenis investasi yang menjanjikan pembayaran bunga yang lebih tinggi.

Menurut Pindyck (2005), suku bunga adalah harga yang dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Seperti harga pasar, penentuan tingkat suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran dari *loanable funds*. Suku bunga dibedakan menjadi dua, yaitu :

3. Suku bunga nominal adalah *rate* yang dapat diamati pasar.

Suku bunga riil adalah konsep yang mengukur tingkat bunga yang sesungguhnya, suku bunga riil sama dengan suku bunga nominal dikurangi dengan laju inflasi yang diharapkan.

$$r = i - \mu$$

dimana: r = suku bunga riil

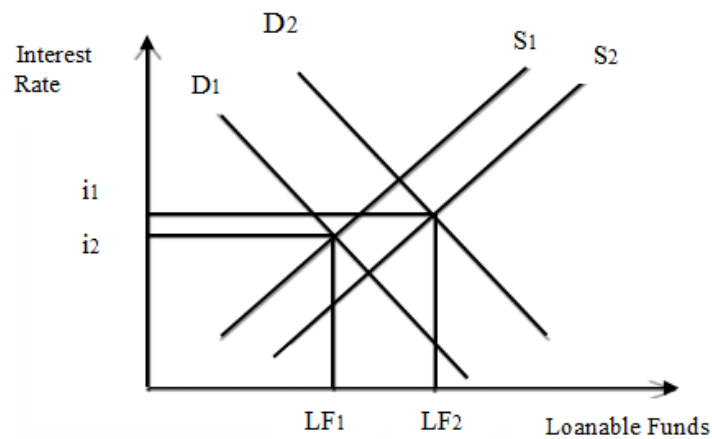
i = suku bunga nominal

μ = laju inflasi

2.1.4.2 Teori Suku Bunga

1. Teori Klasik

Dalam teori klasik yang dikutip dari Boediono (1980), bunga adalah harga dari *loanable funds* (dana investasi). Teori ini dikembangkan oleh kelompok ekonom klasik pada abad ke-19. Suku bunga adalah salah satu indikator dalam memutuskan apakah seseorang akan menabung atau melakukan investasi. Makin tinggi suku bunga, makin banyak dana yang ditawarkan. Dengan demikian, terdapat hubungan positif antara tingkat bunga dengan jumlah dana yang ditawarkan (Boediono, 1991). Pada prinsipnya, suku bunga adalah harga yang harus dibayarkan atas penggunaan dana untuk setiap unit waktu yang telah ditentukan melalui interaksi permintaan dan penawaran. Permintaan akan *loanable fund* memiliki hubungan negatif dengan suku bunga. Dengan asumsi pendapatan dan faktor-faktor lainnya konstan, peningkatan tingkat bunga akan menurunkan permintaan terhadap dana peminjaman (*loanable fund*). Asumsi-asumsi tersebut berlaku dalam perekonomian dalam keadaan *full employment*, harga konstan, *supply of money* tetap, dan informasi sempurna.

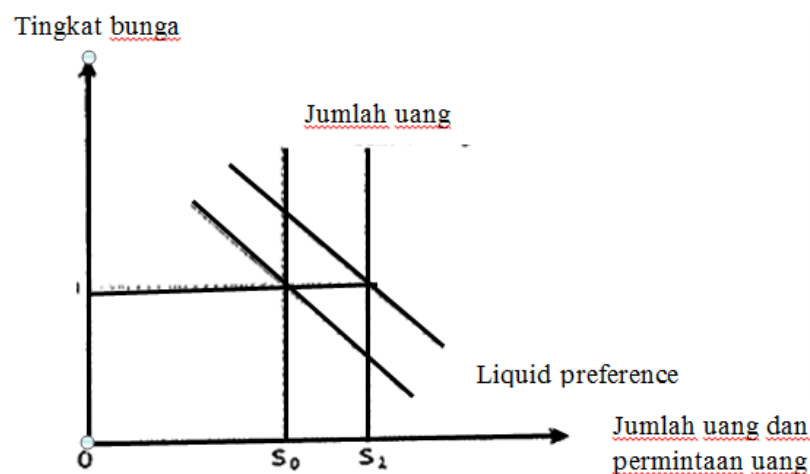


Gambar 2.5 Keseimbangan di Pasar Dana

Sumber: Boediono, 1980. Teori Moneter, Yogyakarta: BPFE

2. Teori Keynes: *Liquidity Preference Theory*

Uang menurut Keynes merupakan salah satu bentuk kekayaan yang dimiliki masyarakat. Alasan masyarakat memegang uang adalah untuk transaksi, berjaga-jaga dan spekulasi. Keynes menganggap bahwa permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga tidak peka terhadap tingkat bunga. Oleh sebab itu, yang dimaksud dengan *liquidity preference* adalah permintaan uang untuk tujuan spekulasi yang menghubungkan permintaan uang dengan tingkat bunga.



Gambar 2.6 Teori Hubungan Jumlah dan Permintaan Uang terhadap Suku Bunga

Sumber: Boediono, 1980. Teori Moneter, Yogyakarta: BPFE

Dalam Gambar 2.6 menunjukkan sumbu horizontal mengukur jumlah dan permintaan uang, dan sumbu vertikal untuk tingkat bunga. Asumsi *Money Supply* adalah tetap, hal ini ditunjukkan dengan kurva vertikalnya, sedangkan kurva *money demand* mempunyai slope negatif. Jika jumlah uang beredar tetap (dengan anggapan *money supply* ditentukan oleh pemerintah), maka permintaan uang akan menentukan tingkat bunga. Dari sisi permintaan, Keynes menganggap ada dua faktor penting yaitu tingkat pendapatan dan harga. Peningkatan pendapatan, dengan asumsi faktor lain tetap, akan menaikkan likuiditas uang yang dibutuhkan masyarakat sehingga kurva permintaan uang bergeser ke kanan, dan tingkat bunga meningkat. Pengaruh harga muncul karena orang ingin memegang sejumlah uang riil. Jika harga barang di pasar naik secara umum, maka dalam rangka mempertahankan uang riil yang dipegang sama dengan sebelumnya, permintaan terhadap uang

nominal naik. Ini berarti apabila ekspektasi inflasi naik, kurva permintaan bergeser ke kanan yang mengakibatkan tingkat bunga akan naik.

2.1.4.3 Fungsi Suku Bunga

Menurut Sunariyah (2013), suku bunga pada suatu perekonomian memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai daya tarik investor untuk menginvestasikan dananya.
2. Tingkat bunga dapat digunakan sebagai alat kontrol bagi pemerintah terhadap dana langsung atau investasi pada sektor-sektor ekonomi.
3. Tingkat suku bunga dapat digunakan sebagai alat moneter dalam rangka mengendalikan penawaran dan permintaan uang yang beredar dalam suatu perekonomian.
4. Pemerintah dapat memanipulasi tingkat suku bunga untuk meningkatkan produksi, sebagai akibatnya tingkat suku bunga dapat digunakan untuk mengontrol tingkat inflasi.

Menurut Puspoprano (2004), tingkat suku bunga mempunyai fungsi atau peran penting bagi perekonomian, yaitu:

1. Membantu mengalirnya tabungan berjalan ke arah investasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi.
2. Mendistribusikan jumlah kredit yang tersedia pada umumnya memberikan dana kredit kepada proyek investasi yang menjanjikan hasil tinggi.
3. Menyeimbangkan jumlah uang beredar dengan permintaan akan uang dari suatu negara.

4. Merupakan alat penting terkait kebijakan pemerintah melalui pengaruhnya terhadap jumlah tabungan dan investasi.

2.1.4.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Suku Bunga

Menurut Kasmir (2010), faktor–faktor yang memengaruhi besar kecilnya penetapan tingkat suku bunga (pinjaman dan simpanan) adalah sebagai berikut:

1. **Kebutuhan Dana**

Faktor kebutuhan dana dikhususkan untuk dana simpanan, yaitu seberapa besar kebutuhan dana yang diinginkan. Apabila bank kekurangan dana sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Namun, peningkatan suku bunga simpanan akan pula meningkatkan suku bunga pinjaman.

2. **Target Laba**

Yang diinginkan faktor ini dikhususkan untuk bunga pinjaman. Sebaliknya apabila dana yang ada dalam simpanan di bank banyak, sementara permohonan pinjaman sedikit, maka bunga simpanan akan turun karena hal ini merupakan beban.

3. **Kualitas Jaminan**

Kualitas jaminan juga diperuntukkan untuk bunga pinjaman. Semakin likuid jaminan yang diberikan, semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya.

4. **Kebijaksanaan Pemerintah**

Dalam menentukan baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman bank tidak boleh melebihi batasan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

5. Jangka Waktu

Faktor jangka waktu sangat menentukan. Semakin panjang jangka waktu pinjaman, akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko macet di masa mendatang. Demikian pula sebaliknya, jika pinjaman berjangka pendek, bunganya relatif rendah.

6. Reputasi Perusahaan

Reputasi perusahaan juga sangat menentukan suku bunga terutama untuk bunga pinjaman. Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karena biasanya perusahaan yang bonafit kemungkinan risiko kredit macet di masa mendatang relatif kecil dan sebaliknya.

7. Produk yang Kompetitif

Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. Hal ini disebabkan produk yang kompetitif tingkat perputaran produknya tinggi sehingga pembayarannya diharapkan lancar.

8. Hubungan Baik

Biasanya bunga pinjaman dikaitkan dengan faktor kepercayaan kepada seseorang atau lembaga. Dalam praktiknya, bank menggolongkan nasabah antara nasabah utama dan nasabah biasa. Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan kepada bank. Nasabah

yang memiliki hubungan baik dengan bank tentu penentuan suku bunganya pun berbeda dengan nasabah biasa.

9. Persaingan

Dalam kondisi tidak stabil dan bank kekurangan dana, sementara tingkat persaingan dalam memperebutkan dana simpanan cukup ketat, maka bank harus bersaing keras dengan bank lainnya. Untuk bunga pinjaman, harus berada di bawah bunga pesaing agar dana yang menumpuk dapat tersalurkan, meskipun margin laba mengecil.

10. Jaminan Pihak Ketiga.

Dalam hal ini pihak yang memberikan jaminan kepada bank untuk menanggung segala resiko yang dibebankan kepada penerima kredit. Biasanya apabila pihak yang memberikan jaminan bonafit, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitasnya terhadap bank, maka bunga yang dibebankan pun berbeda.

2.1.5 Infrastruktur

2.1.5.1 Pengertian Infrastruktur

Secara bahasa, dalam kamus besar bahasa Indonesia infrastruktur dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana umum. Sarana secara umum diketahui sebagai fasilitas publik seperti rumah sakit, jalan, jembatan, sanitasi, telepon dan sebagainya. Lebih jauh lagi, dalam ilmu ekonomi infrastruktur merupakan wujud dari *public capital* (modal publik) yang dibentuk dari investasi yang dilakukan pemerintah. (Mankiw, 2003: 38).

Secara umum, infrastruktur dapat diartikan sebagai struktur dan fasilitas dasar, baik fisik maupun sosial, seperti misalnya konstruksi bangunan, jalan tol,

dan pasokan listrik, dan berbagai macam hal yang diperlukan untuk operasional kegiatan masyarakat ataupun pelayanan publik.

Infrastruktur adalah semua fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat umum untuk mendukung berbagai kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, infrastruktur merupakan semua fasilitas, baik fisik maupun non fisik yang dibangun oleh pemerintah maupun perorangan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam berbagai kehidupan sosial dan masyarakat.

2.1.5.2 Teori Infrastruktur

Menurut Setyaningrum (1997), infrastruktur merupakan bagian capital stok, yaitu biaya tetap sosial yang langsung mendukung produksi. Definisi lain mengenai infrastruktur yaitu mengacu pada fasilitas fisik dan termasuk kerangka organisasional, pengetahuan dan teknologi yang penting untuk organisasi masyarakat dan pembangunan ekonomi. Infrastruktur dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu infrastruktur berdasarkan fungsi dan keperuntukannya.

Familioni (2004) menjelaskan bahwa infrastruktur dibedakan menjadi infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial. Infrastruktur ekonomi diantaranya utilitas publik seperti listrik, telekomunikasi, suplai air bersih, sanitasi, dan saluran pembuangan dan gas. Termasuk pekerjaan umum seperti jalan kereta api, angkutan kota, dan bandara. Sedangkan infrastruktur sosial dibedakan menjadi infrastruktur pendidikan dan kesehatan.

Pembahasan infrastruktur cenderung mengarah dalam pembahasan barang publik. Dijelaskan oleh Stiglitz (2000) yang mengatakan bahwa beberapa infrastruktur seperti jalan tol merupakan salah satu barang publik yang disediakan oleh pemerintah meski infrastruktur ini bukan barang publik murni. Dengan memahami sifat dari infrastruktur sebagai barang publik, dapat disimpulkan teori

infrastruktur memiliki karakter eksternalitas. Hal ini sesuai dengan sifat infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah dan setiap pihak yang menggunakan infrastruktur tidak memberikan bayaran secara langsung atas penggunaan infrastruktur. Bagi sektor privat infrastruktur merupakan input yang tidak berbayar dan inilah yang disebut eksternalitas pada infrastruktur.

Caning dan Pedroni (2004) menyatakan infrastruktur memiliki sifat eksternalitas. Berbagai infrastruktur seperti jalan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya memiliki sifat eksternalitas positif. Eksternalitas positif dalam infrastruktur berupa efek limpahan dalam bentuk peningkatan produksi perusahaan dan sektor pertanian tanpa meningkatkan input modal dan tenaga kerja serta meningkatkan teknologi. Dengan dibangunnya infrastruktur, tingkat produktivitas akan meningkat. Salah satunya yang paling nampak adalah pembangunan jalan.

Manfaat pembangunan jaringan jalan dapat dilihat dari peningkatan mobilitas dan efisiensi yang terjadi dalam masyarakat. Adanya peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan jalan akan mendorong peningkatan lalu lintas orang, barang, maupun jasa-jasa baik oleh masyarakat setempat maupun mobilitas antar daerah. Sehingga akan menciptakan produktivitas angkutan jalan yang selanjutnya menghasilkan efisiensi biaya baik biaya transportasi rumah tangga non produksi maupun rumah tangga produksi (perusahaan). Peningkatan efisiensi dapat menghemat biaya per unit konsumsi atau produksi. Dengan demikian, manfaat dengan tersedianya jaringan jalan maka potensi daerah dapat lebih didayagunakan. Selain itu, manfaat juga berasal dari peningkatan pendapatan dari sektor-sektor yang memasok input-input (tenaga kerja, modal, dan bahan baku)

dalam pembangunan jalan. Peningkatan pendapatan berarti mendorong peningkatan daya beli masyarakat dan selanjutnya akan berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi. Dengan dibangunnya infrastruktur, tingkat produktivitas perusahaan dan sektor pertanian akan meningkat. Salah satunya (yang paling nampak) adalah pembangunan jalan (Wyle : 1996) dalam (Latip : 2009).

2.1.5.3 Jenis Infrastruktur

Mengacu pada pengertian infrastruktur, ada beberapa jenis infrastruktur yang dirancang agar mampu melayani masyarakat. Beberapa jenis infrastruktur adalah sebagai berikut:

1. Infrastruktur Keras

Infrastruktur keras merupakan infrastruktur yang berkaitan dengan pembangunan fasilitas umum yang wujudnya fisik, seperti misalnya jalan raya, jembatan, jalur kereta api, bandara, pelabuhan.

2. Infrastruktur Keras Non-Fisik

Infrastruktur Keras Non-Fisik dapat diartikan sebagai infrastruktur yang berhubungan dengan fungsi utilitas publik, seperti pengadaan air bersih, penyediaan pasokan listrik, jaringan komunikasi, serta pasokan energi.

3. Infrastruktur Lunak

Infrastruktur lunak adalah jenis infrastruktur yang berkaitan dengan sistem, nilai, norma, peraturan, serta pelayanan publik. Contoh dari infrastruktur ini antara lain: Etika kerja, Peraturan lalu lintas, Pelayanan publik, Undang-undang hukum yang berkaitan dengan perdagangan, pernikahan, dan lain sebagainya.

Menurut (Basri : 2002) keunikan dari infrastruktur adalah sifat eksternalitas positif yang tinggi. Eksternalitas adalah aktivitas yang dilakukan oleh satu pihak

berdampak pada pihak lain sehingga mengakibatkan kerugian (peningkatan biaya) atau keuntungan (penurunan biaya pada pihak lain tersebut. Jika akibatnya merugikan disebut sebagai eksternalitas negatif jika menguntungkan disebut eksternalitas positif. Karena sifat eksternalitas positif yang tinggi, infrastruktur dapat mendorong atau merangsang tumbuhnya sektor lain.

2.1.5.4 Bagian-bagian Infrastruktur di Indonesia

Menurut (Sanjaya : 2018) Pembangunan infrastruktur di Indonesia terbagi jadi beberapa bagian yaitu transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Jika keempat bagian itu di bangun secara benar dan teratur maka Indonesia bisa bebas dari permasalahan pembangunan infrastruktur dan menjadi negara yang maju. Berikut penjelasan dari keempat bagian dari pembangunan infrastruktur di Indonesia.

1. Transportasi

Transportasi diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Proses pengangkutan merupakan gerakan dari tempat asal, dari mana kegiatan angkutan dimulai, ke tempat tujuan, kemana kegiatan pengangkutan diakhiri. Peranan transportasi sangat penting untuk saling menghubungkan daerah sumber bahan baku, daerah produksi, daerah pemasaran dan daerah pemukiman sebagai tempat tinggal konsumen.

Sistem transportasi dari suatu wilayah dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari prasarana/sarana dan sistem pelayanan yang memungkinkan adanya pergerakan ke seluruh wilayah, sehingga (Santoso, 1996:1): terakomodasinya mobilitas penduduk, dimungkinkan adanya pergerakan barang, dimungkinkan akses ke semua wilayah.

Transportasi manusia atau barang biasanya bukanlah merupakan tujuan akhir, tetapi hal itu dilakukan untuk mencapai tujuan lain, oleh karena itu, permintaan atas jasa transportasi disebut sebagai permintaan turunan (*derived demand*) yang timbul akibat adanya permintaan akan komoditi atau jasa lain. Pada dasarnya permintaan atas jasa transportasi diturunkan dari (Morlok, 2000 : 452):

- Kebutuhan seseorang untuk berjalan dari satu lokasi ke lokasi lainnya untuk melakukan suatu kegiatan (misalnya bekerja, sekolah).
- Permintaan akan angkutan barang tertentu agar tersedia di tempat yang diinginkan.

Untuk menunjang perkembangan ekonomi yang mantap perlu dicapai keseimbangan antara penyediaan dan permintaan angkutan. Jika penyediaan jasa angkutan lebih kecil daripada permintaannya, akan terjadi kemacetan arus barang dan penumpang yang dapat menimbulkan kegoncangan harga di pasaran. Sebaliknya, jika penawaran jasa angkutan melebihi permintaannya maka akan timbul persaingan tidak sehat yang akan menyebabkan banyak perusahaan angkutan rugi dan menghentikan kegiatannya, sehingga penawaran jasa angkutan berkurang, selanjutnya menyebabkan ketidaklancaran arus barang dan kegoncangan harga di pasaran.

2. Telekomunikasi

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/ atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan,

gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.

3. Sanitasi

Sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Pemerintah Indonesia harus bisa mengatasi masalahsanitasi ini karena bila pemerintah Jakarta tidak bisa mengatasi sanitasi ini negara Indonesia ini akan memiliki kebudayaan hidup yang tidak sehat dan lingkungan yang tidak sehat juga.

4. Energi

Energi sangat memegang peran yang penting dalam kehidupan manusia begitu juga dengan masyarakat di Indonesia. Indonesia sudah dipastikan memerlukan sumber energi yang besar untuk menghidupi kota Indonesia ini. Untuk itu masalah ini pemerintah Indonesia juga harus mengambil tindakan

untuk mengatasi masalah energi ini. Mungkin di pikiran kita saat ini terlintas untuk menggunakan energi nuklir, ya seharusnya pemerintah Indonesia juga memikirkan energi alternatif yaitu nuklir. Wacana energi nuklir sudah sering diperbincangkan tetapi ada pro kontra terhadap energi nuklir ini, bagi pihak yang kontra menjelaskan bahwa energi nuklir sangat berbahaya karena radiasi dari nuklir tersebut dapat menyebabkan kematian bila seseorang menghirup udara yang sudah tercemar oleh nuklir, sedangkan pro menjelaskan energi ini sangat baik dan efisien pemakaian dibandingkan dengan energi minyak bumi atau batu bara. Pemerintah Indonesia harus bisa membuat keputusan tentang masalah energi ini karena Indonesia sangat membutuhkan energi yang sangat besar.

2.1.6 Elastisitas

Elastisitas adalah derajat kepekaan kuantitas yang diminta atau ditawarkan terhadap salah satu faktor yang mempengaruhi fungsi permintaan atau penawaran (Lincoln Arsyad, 1991). Elastisitas permintaan mengukur perubahan relatif dalam jumlah unit barang yang dibeli sebagai akibat perubahan salah satu faktor yang mempengaruhinya (*ceteris paribus*).

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Judul dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Putu Kartika Dewi, Nyoman Triaryati. PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, SUKU BUNGA DAN PAJAK TERHADAP INVESTASI ASING LANGSUNG. E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 4, No. 4, 2015: 866-878. ISSN : 2302-8912.	Variabel Bebas yang dipakai Suku Bunga, Variabel terikat Penanaman Modal Asing	Variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pajak	Hasil analisis ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap investasi asing langsung dan suku bunga dan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap investasi asing langsung.
2.	Alghifari M Igamo. PENGARUH RESIKO EKONOMI TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI NEGARA ASEAN (STUDI KASUS PERBANDINGAN ANTARA NEGARA INDONESIA, MALAYSIA, SINGAPURA, THAILAND, FILIPPINA, BRUNEI DAN MYANMAR). Jurnal Ekonomi Pembangunan ISSN 1829-5843 hal: 75-85.	Variabel Bebas Inflasi. Variabel terikat adalah penanaman modal asing.	Variabel bebas yang dipakai PDB Riil, nilai tukar, dan cadangan devisa.	Hasil menunjukkan bahwa secara individual PDB Riil dan Cadangan Devisa secara statistik memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Penanaman Modal Asing di negara-negara ASEAN pada tahun 2004-2013. Berdasarkan hasil dengan proses perhitungan yang sama dapat diketahui bahwa secara individual Inflasi dan Nilai Tukar secara statistik tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penanaman Modal Asing di negara-negara ASEAN pada tahun 2004-2013.

No.	Penulis, Judul dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Muhamad Dahlan Sely/Pengaruh Upah, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Tingkat Suku Bunga terhadap Investasi di Provinsi Maluku/Jurnal Vol. XXI No. 1, Desember 2019. ISSN: 1978-3612	Variabel Bebas yang dipakai Suku Bunga, Inflasi.	Variabel Upah, Pertumbuhan Ekonomi	Secara bersama-sama variabel bebas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap investasi. Secara parsial, variabel upah dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap investasi. Variabel inflasi memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan. Tetapi, variabel tingkat suku bunga memiliki pengaruh yang negatif.
4.	Gusti Agung Ayu Ratih Meita Sari, I Gede Kajeng Baskara/Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Suku Bunga dan Nilai Tukar terhadap Investasi Asing Langsung di Indonesia/E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 7, No. 7, 2018: 4002-4030 ISSN: 2302-8912	Variabel Bebas Suku Bunga	Variabel Nilai Tukar, Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap investasi asing langsung. Suku bunga pada penelitian ini memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap investasi asing langsung. Nilai tukar pada penelitian ini mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap investasi asing langsung.
5.	Faisal Haris Pratama, Sri Marhaeni Salsiyah, Sri Wahyuni. ANALISIS PENGARUH ANGKATAN KERJA, UPAH KARYAWAN DOMESTIK, DAN INFRASTRUKTUR	Variabel bebas Infrastruktur. Variabel terikatnya adalah penanaman modal asing.	Variabel bebas yang dipakai adalah angkatan kerja, upah karyawan domestik.	Hasil menunjukkan bahwa hubungan Angkatan kerja secara individu memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penanaman modal asing, upah

No.	Penulis, Judul dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI JAWA TENGAH MELALUI BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH (BPMD) PROVINSI JATENG (PERIODE 2000- 2013. JOBS (JURNAL OF BUSINESS STUDIES) ISSN: 2461-0704 & e- ISSN: 2476-8790.			karyawan domestik secara individu mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penanaman modal asing, infrastruktur secara individu memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penanaman modal asing.
6.	Ni Made Krisna Marsela/Pengaruh Tingkat Inflasi, PDRB, Suku Bunga Kredit, serta Kurs Dollar terhadap Investasi/E-Jurnal EP Unud, [3]: 77-87. Maret 2014 ISSN: 2303-0178	Variabel Suku Bunga	Variabel PDRB dan kurs	Hasil penelitian menunjukkan secara simultan PDRB, suku bunga kredit, serta kurs dollar berpengaruh signifikan terhadap investasi. Secara parsial PDRB dan kurs dollar berpengaruh signifikan terhadap investasi. Tingkat inflasi dan suku bunga kredit secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan kepada investasi
7.	Adrian Sutawijaya, Zulfahmi. FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INVESTASI SWASTA DI INDONESIA. Trikonomika Volume 12, No. 1, Juni 2013, Hal. 32-39 ISSN1411-514X	Variabel bebas yang dipakai adalah Investasi swasta dari penanaman modal asing.	Variabel bebas yang dipakai suku bunga kredit, pengeluaran pemerintah, dan PDB.	Hasil dari penelitian ini adalah faktor suku bunga akan berpengaruh terhadap investasi swasta sebesar ke 5280 miliar. PDB akan memberikan efek positif pada investasi dan juga pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif pada investasi.

No.	Penulis, Judul dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	Rauzatul Jannah, Asnawi/Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Investasi di Indonesia Tahun 1990-2017/Jurnal Ekonomi Regional Unimal Volume 02 Nomor 02 Agustus 2019 E-ISSN: 2615-126X	Variabel Suku bunga, dan inflasi	Variabel Pertumbuhan ekonomi, Kurs.	Hasil penelitian menunjukkan secara parsial suku bunga dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap investasi. Inflasi tidak berpengaruh terhadap investasi dan kurs berpengaruh positif dan signifikan. Secara simultan suku bunga, inflasi, kurs dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap investasi
9.	Amida Tri Septifany R, Rustam Hidayat Sri, Sulasmiyati. ANALISIS PENGARUH INFLASI, TINGKAT SUKU BUNGA, NILAI TUKAR RUPIAH DAN CADANGAN DEvisa TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA (Studi Pada Bank Indonesia Periode Tahun 2006-2014). Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 25 No. 2 Agustus 2015	Variabel Bebas Suku Bunga, Inflasi. Variabel terikat adalah penanaman modal asing.	Variabel bebas yang dipakai PDB Riil, nilai tukar, dan cadangan devisa.	Hasil penelitian ini adalah variabel inflasi, suku bunga SBI, nilai tukar rupiah terhadap dollar, dan cadangan devisa secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia. Variabel Suku bunga SBI dan cadangan devisa memiliki efek positif dan signifikan terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia, sementara variabel inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap dolar memiliki efek negatif dan berpengaruh signifikan terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia.

No.	Penulis, Judul dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	Monica Letarisky Darminto R. Rustam Hidayat. PENGARUH INDIKATOR FUNDAMENTAL MAKROEKONOMI TERHADAP FOREIGN DIRECT INVESTMENT DI INDONESIA (Periode Tahun 2004-2013). Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 15 No. 2 Oktober 2014	Variabel Bebas Inflasi. Variabel terikat adalah Penanaman Modal Asing.	Variabel bebas yang dipakai PDB Riil, nilai tukar, dan cadangan devisa.	Hasil dari penelitian ini adalah variabel Produk Domestik Bruto dan variabel tingkat suku bunga SBI memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penanaman modal asing langsung yang masuk ke Indonesia, sedangkan variabel tingkat inflasi dan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap penanaman modal asing langsung yang masuk ke Indonesia. Variabel Produk Domestik Bruto, tingkat inflasi, tingkat suku bunga SBI, dan nilai tukar Rupiah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penanaman Modal Asing Langsung yang masuk ke Indonesia.
11.	Annisa Fitra Hapsari. ANALISIS PENGARUH INFRASTRUKTUR DAN TENAGAKERJA TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI KABUPATEN KARAWANG (PERIODE TAHUN 1996-2013). E- Jurnal Fakultas Ekonomi dan Managemn Institut Pertanian Bogor 201	Variabel bebas Infrastruktur Jalan, dan Variabel Terikat Penanaman Modal Asing	Variabel bebas Tenaga Kerja	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel bebas yang digunakan di dalam penelitian, diantaranya infrastruktur panjang jalan (JLN) dan listrik (LIST) memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan PMA di Kabupaten

No.	Penulis, Judul, dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Karawang. Sementara itu, infrastruktur air bersih (AIR) dan tenaga kerja (TK) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan PMA di Kabupaten Karawang.
12.	Ferdy Posumah. PENGARUH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP INVESTASI DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 15 No. 02 2015.	Variabel terikat menggunakan penanaman modal asing.	Variabel bebas infrastruktur kesehatan, pendidikan, dan pertanian. Lokasi Penelitian di wilayah Kabupaten.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur kesehatan, pendidikan tidak berpengaruh terhadap investasi. Sedangkan pembangunan infrastruktur sector pertanian berpengaruh terhadap investasi.
13.	Friend Landes Alberto Gultom. Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap PMA dan PMDN di Kabupaten Deli Serdang 2001-2016. Repository Institusi USU, Universitas Sumatera Utara.	Variabel bebas menggunakan Infrastruktur Jalan. Variabel terikat menggunakan Investasi PMA.	Variabel terikat menggunakan Investasi. PMDN.	Hasil menunjukkan bahwa variabel infrastruktur listrik secara parsial mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap investasi PMDN maupun PMA. Variabel infrastruktur jalan mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap investasi PMDN maupun PMA. Sedangkan variabel infrastruktur air memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap investasi PMA, namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap investasi PMDN.

No.	Penulis, Judul, dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14.	Sonia Pratiwi, Mike Triani. ANALISIS PENGARUH INFRASTRUKTUR EKONOMI DAN UPAH TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI PULAU SUMATERA. Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan, Volume 1, Nomor 3, Agustus 2019.	Variabel bebas menggunakan infrastruktur jalan, dan telekomunikasi. Variabel terikat menggunakan PMA.	Variabel bebas Upah. Lokasi Penelitian di wilayah Pulau Sumatera.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara infrastruktur jalan dengan PMA di Pulau Sumatera. Ada pengaruh antara infrastruktur listrik terhadap PMA di Pulau Sumatera. Ada pengaruh antara infrastruktur telekomunikasi dengan PMA di Pulau Sumatera. Tidak ada pengaruh antara upah dengan PMA di Pulau Sumatera, sedangkan ada pengaruh secara bersama-sama antara infrastruktur jalan, infrastruktur listrik, infrastruktur telekomunikasi, dan upah dengan PMA di Pulau Sumatera
15.	Sanusi, Kuncoro, dan Herianingrum. MAKROEKONOMI DAN PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA: BUKTI EMPIRIS DI PULAU JAWA. Jurnal Ekonomi/Volume XXIV, No. 02 July 2019.	Variabel terikat menggunakan PMA. Variabel Bebas Inflasi.	Variabel bebas menggunakan variabel Makroekonomi, yakni jumlah penduduk, PDRB, dan Upah.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk (populasi) berpengaruh positif signifikan terhadap penanaman modal asing. Variabel inflasi memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap PMA. Variabel PDRB memiliki pengaruh positif signifikan terhadap FDI, sedangkan untuk Upah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap FDI.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Hubungan Inflasi dengan Penanaman Modal Asing di Indonesia

Inflasi dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian di suatu negara karena dapat menurunkan produksi. Inflasi memberikan dampak negatif terhadap kegiatan investasi berupa biaya investasi yang tinggi, biaya investasi akan lebih murah jika tingkat inflasi suatu negara rendah dan akan meningkatkan Investasi di Indonesia. Tingginya tingkat inflasi membuat konsumsi masyarakat berkurang karena menurunnya kemampuan masyarakat untuk membeli barang akibat harga yang melambung tinggi. Ketidakstabilan perekonomian suatu negara dapat menjadi penghalang masuknya investasi ke suatu negara. Inflasi dapat menyebabkan tingkat resiko kegagalan usaha semakin besar. Hubungan ini didukung oleh penelitian Amida Tri Septifany R (2015) menyatakan bahwa inflasi memiliki hubungan negatif antara Inflasi dengan penanaman modal asing.

Jadi, terdapat hubungan yang negatif antara Inflasi dengan penanaman modal asing di Indonesia.

2.2.2 Hubungan Suku Bunga dengan Penanaman Modal Asing di Indonesia

Suku bunga adalah faktor penting dalam mengambil suatu keputusan untuk berinvestasi atau tidak berinvestasi di masa depan. Menurut Anna (2012), tingkat bunga adalah tingkat yang dibebankan atau dibayar untuk penggunaan uang atau lebih tepatnya biaya pinjaman. Terjadinya peningkatan suku bunga mengakibatkan investasi akan mengalami suatu penurunan dan begitu sebaliknya, apabila suku bunga

turun sehingga investasi akan mengalami suatu peningkatan hal ini dikarenakan biaya dari investasi mengalami penurunan. Jika suku bunga tinggi maka jumlah investasi akan berkurang. Sebaliknya, jika suku bunga rendah maka akan mendorong investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hubungan ini didukung oleh penelitian Putu Kartika Dewi dan Nyoman Triyati (2015) yang menyatakan hubungan negatif antara suku bunga dengan penanaman modal asing.

Jadi, terdapat hubungan yang negatif antara suku bunga dengan penanaman modal asing di Indonesia.

2.2.3 Hubungan Infrastruktur Jalan dengan Penanaman Modal Asing di Indonesia

Jalan merupakan tempat atau jalur yang digunakan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti penyaluran hasil produksi perusahaan ke berbagai daerah. Infrastruktur jalan merupakan infrastruktur yang sangat dibutuhkan bagi transportasi darat. Fungsi jalan adalah sebagai penghubung antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Jalan merupakan infrastruktur yang paling berperan dalam perekonomian nasional, terutama untuk pemerataan investasi asing di Indonesia. Sehingga naik dan turunnya pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dipengaruhi oleh baik buruknya infrastruktur jalan. Hubungan ini didukung oleh penelitian I Ketut Sumadisa (2018) yang menyatakan hubungan positif antara infrastruktur jalan dengan penanaman modal asing.

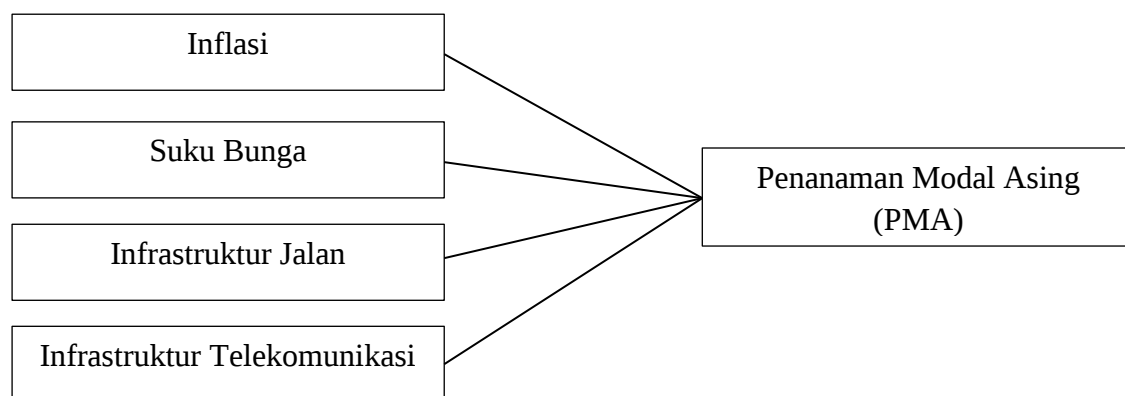
Jadi, terdapat hubungan yang positif antara infrastruktur jalan dengan penanaman modal asing di Indonesia.

2.2.4 Hubungan Infrastruktur Telekomunikasi dengan Penanaman Modal Asing di Indonesia

Investor asing akan memilih negara yang memiliki ketersediaan infrastruktur telekomunikasi yang baik. Infrastruktur telekomunikasi menjadi faktor penting untuk menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya karena ketersediaan infrastruktur telekomunikasi secara baik pada suatu negara dapat mempermudah para investor asing untuk berkomunikasi dengan negara yang akan menjadi tujuan bagi para investor asing untuk menanamkan modalnya. Sehingga dapat menghemat biaya dan waktu yang akan dikeluarkan oleh investor asing. Hubungan ini didukung oleh penelitian Sonia Pratiwi (2019) yang menyatakan hubungan positif antara infrastruktur telekomunikasi dengan penanaman asing modal.

Jadi, terdapat hubungan yang positif antara infrastruktur telekomunikasi dengan penanaman modal asing di Indonesia.

Berikut kerangka pemikiran penulis yang berguna untuk memperjelas arah pemikiran penulis dalam menganalisis data:



Gambar 2.7 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan hasil studi terdahulu tentang Inflasi, Suku Bunga, dan Infrastruktur maka dalam penelitian akan diajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Telekomunikasi secara parsial berpengaruh positif terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia Tahun 2005-2019. Sedangkan Inflasi dan Suku Bunga berpengaruh negatif terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia 2005-2019.
2. Diduga Inflasi, Suku Bunga, Infrastruktur Jalan, dan Infrastruktur Telekomunikasi secara bersama berpengaruh terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia Tahun 2005-2019.
3. Diduga kepekaan Penanaman Modal Asing terhadap Inflasi, Suku Bunga, Infrastruktur aln dan Infrastruktur Telekomunikasi di Indonesia tahun 2005-2019 adalah Inelastis.